

Pendapatan Retribusi Daerah- Polemik Retribusi Sampah Bonto Duri, Ketua RT Minta Persetujuan Warga Usai Diperiksa Inspektorat



Sumber gambar:

<https://makassar.tribunnews.com/2024/07/07/polemik-retribusi-sampah-bonto-duri-ketua-rt-minta-persetujuan-warga-usai-diperiksa-inspektorat>

Ketua RT06/RW05 Kelurahan Bonto Duri Kecamatan Tamalate dua hari terakhir ini mendatangi rumah warga, (6-7/7/2024).

Pihak Ketua RT tersebut meminta persetujuan warga terkait retribusi sampah yang telah dinaikkan sepihak, dari Rp25 ribu menjadi Rp35 ribu.

Diketahui, oknum ketua RT tersebut telah diperiksa oleh Inspektorat Kota Makassar sekaitan dengan laporan retribusi sampah yang ditetapkan sepihak.

Yang bersangkutan disinyalir sedang mencari pembuktian bahwa warga tidak keberatan dengan retribusi sampah tersebut.

Warga pun menolak untuk memberikan persetujuannya dengan menandatangani kertas yang disodorkan pihak RT.

Seperti yang disampaikan oleh salah satu warga, Santi. Ia menyampaikan enggan untuk menandatangani kertas tersebut karena tidak sesuai aturan yang berlaku.

Ibu RT menetapkan Rp35 ribu tanpa adanya musyawarah warga. Dan kami warga RT 6 RW 5 mengikuti membayar Rp35 ribu beberapa bulan ini karena katanya ini hasil rakor di kelurahan, RT, RW di Kelurahan Bonto Duri," ungkap Santi.

Tidak hanya itu, selama ini mereka memungut biaya sampah tanpa disertai bukti pembayaran seperti kuitansi pembayaran resmi yang digunakan di Kecamatan.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Saya pernah mengusulkan kepada ibu RT bahwa usulan di kelurahan buat kuitansi retribusi, tapi tidak diindahkan sampai sekarang hanya paraf kalau bayar iuran," jelasnya.

Hal sama disampaikan oleh Suriati, ia menilai Ketua RT begitu arogan karena menetapkan peraturan sepihak, tidak sesuai regulasi.

Bahkan ia menilai tindakan tersebut sudah termasuk pengutan liar (pungli). Belum lagi fasilitas yang diberikan tidak maksimal.

"Sampah saya tidak pernah diambil tukang sampah, padahal saya sudah taruh depan rumah, saya sudah kasi tau ibu RT tapi katanya nanti viar sampah yang ambil, tapi tidak diambil," bebrnya.

Kendati begitu, ada juga beberapa warga yang menandatangani kertas tersebut dengan alasan terpaksa.

Fhiah warga [Bonto Duri](#) mengungkap bahwa kertas persetujuan retribusi tersebut dibawa langsung oleh anak Ketua RT 06.

Ketua RT06/RW05 Kelurahan [Bonto Duri](#) Kecamatan Tamalate dua hari terakhir ini mendatangi rumah warga, (6-7/7/2024).

Pihak Ketua RT tersebut meminta persetujuan warga terkait retribusi sampah yang telah dinaikkan sepihak, dari Rp25 ribu menjadi Rp35 ribu.

Diketahui, oknum ketua RT tersebut telah diperiksa oleh Inspektorat Kota [Makassar](#) sekaitan dengan laporan retribusi sampah yang ditetapkan sepihak.

Yang bersangkutan disinyalir sedang mencari pembuktian bahwa warga tidak keberatan dengan retribusi sampah tersebut.

Warga pun menolak untuk memberikan persetujuannya dengan menandatangani kertas yang disodorkan pihak RT.

Seperti yang disampaikan oleh salah satu warga, Santi. Ia menyampaikan enggan untuk menandatangani kertas tersebut karena tidak sesuai aturan yang berlaku.

Ibu RT menetapkan Rp35 ribu tanpa adanya musyawarah warga. Dan kami warga RT 6 RW 5 mengikuti membayar Rp35 ribu beberapa bulan ini karena katanya ini hasil rakor di kelurahan, RT, RW di Kelurahan [Bonto Duri](#)," ungkap Santi.

Tidak hanya itu, selama ini mereka memungut biaya sampah tanpa disertai bukti pembayaran seperti kuitansi pembayaran resmi yang digunakan di Kecamatan.

Saya pernah mengusulkan kepada ibu RT bahwa usulan di kelurahan buat kuitansi retribusi, tapi tidak diindahkan sampai sekarang hanya paraf kalau bayar iuran," jelasnya.

Hal sama disampaikan oleh Suriati, ia menilai Ketua RT begitu arogan karena menetapkan peraturan sepihak, tidak sesuai regulasi.

Bahkan ia menilai tindakan tersebut sudah termasuk pengutan liar (pungli). Belum lagi fasilitas yang diberikan tidak maksimal.

"Sampah saya tidak pernah diambil tukang sampah, padahal saya sudah taruh depan rumah, saya sudah kasi tau ibu RT tapi katanya nanti viar sampah yang ambil, tapi tidak diambil-ambil," bebarnya.

Kendati begitu, ada juga beberapa warga yang menandatangani kertas tersebut dengan alasan terpaksa.

Fhiah warga [Bonto Duri](#) mengungkap bahwa kertas persetujuan retribusi tersebut dibawa langsung oleh anak Ketua RT 06.

Adapun insentif Pj RT/RW bertambah Rp200 ribu.

Total diterima kini Rp1,2 juta tiap bulannya.

"Jadi pencairan insentif untuk bulan Januari masih pakai yang lama. Kalau untuk Februari dan Maret pakai Perwali yang baru," ungkap Firman saat ditemui di ruang kerjanya, di Kantor Wali Kota [Makassar](#) lantai 2, Jalan Ahmad Yani, Selasa (26/3/2024).

Sebelumnya, Wali Kota [Makassar](#) Danny Pomanto akan mengevaluasi Penjabat (Pj) [Ketua RT/RW di Makassar, Sulawesi Selatan](#).

Evaluasi Pj RT/RW akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Segera dievaluasi. Akan ada (pergantian). Karena RT/RW ternyata banyak tidak aktif. Saya baru dapat (informasinya)," beber Danny Pomanto di Balai Kota [Makassar](#) Jl Ahmad Yani, Rabu (19/6/2024).

Selain karena tidak aktif, banyak juga RT/RW mengundurkan diri, bahkan ada tersandung masalah hukum.

Danny membeberkan, beberapa oknum RT/RW bahkan menyelewengkan tagihan sampah masyarakat.

"Ada yang mengundurkan diri, ada yang bermasalah hukum, ada yang malas, ada beberapa yang mohon maaf, tilep uang sampah. Diberhentikan itu. Harus diberhentikan," katanya.

Kisaran RT/RW berkinerja rendah hingga tidak aktif mencapai ratusan orang.

Hitungan kasarnya, satu kecamatan sekitar 40 sampai 50 orang diidentifikasi bermasalah.

"Banyak (yang bermasalah) saya kalau tadi malam laporannya anggaphlah 50-40 orang dikali 15 (kecamatan)," jelasnya.

Jika dikalkulasi, total Pj RT/RW bakal dievaluasi mencapai 600-750 orang.

Danny mengaku telah mengantongi nama-nama RT/RW yang berpotensi diganti.

Dalam proses evaluasi tersebut, ia akan memanggil langsung yang bersangkutan untuk mengkonfirmasi secara langsung.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

"Tapi nama-nama sudah ada. Saya evaluasi lagi. Panggil orangnya satu-satu. (Panggil) Semua termasuk yang tidak aktif. Supaya jangan sampai salah," ujarnya.

Setelah pergantian tersebut, Danny Pomanto akan memaksimalkan kembali kerja-kerja RT/RW.

Sebelumnya, Wali Kota [Makassar](#) Danny Pomanto akan mengevaluasi Penjabat (Pj) [Ketua RT/RW di Makassar, Sulawesi Selatan](#).

Evaluasi Pj RT/RW akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Segera dievaluasi. Akan ada (pergantian). Karena RT/RW ternyata banyak tidak aktif. Saya baru dapat (informasinya)," beber Danny Pomanto di Balai Kota [Makassar](#) Jl Ahmad Yani, Rabu (19/6/2024).

Selain karena tidak aktif, banyak juga RT/RW mengundurkan diri, bahkan ada tersandung masalah hukum.

Danny membeberkan, beberapa oknum RT/RW bahkan menyelewengkan tagihan sampah masyarakat.

"Ada yang mengundurkan diri, ada yang bermasalah hukum, ada yang malas, ada beberapa yang mohon maaf, tilep uang sampah. Diberhentikan itu. Harus diberhentikan," katanya.

Kisaran RT/RW berkinerja rendah hingga tidak aktif mencapai ratusan orang.

Hitungan kasarnya, satu kecamatan sekitar 40 sampai 50 orang diidentifikasi bermasalah.

"Banyak (yang bermasalah) saya kalau tadi malam laporannya anggaplah 50-40 orang dikali 15 (kecamatan)," jelasnya.

Jika dikalkulasi, total Pj RT/RW bakal dievaluasi mencapai 600-750 orang.

Danny mengaku telah mengantongi nama-nama RT/RW yang berpotensi diganti.

Dalam proses evaluasi tersebut, ia akan memanggil langsung yang bersangkutan untuk mengkonfirmasi secara langsung.

"Tapi nama-nama sudah ada. Saya evaluasi lagi. Panggil orangnya satu-satu. (Panggil) Semua termasuk yang tidak aktif. Supaya jangan sampai salah," ujarnya.

Setelah pergantian tersebut, Danny Pomanto akan memaksimalkan kembali kerja-kerja RT/RW.

Adapun dalam hal tersebut, Siap-siap! Iuran sampah di Kota [Makassar](#) bakal naik.

Pemerintah Kota [Makassar](#) akan memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari retribusi sampah.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, jumlah pendapatan retribusi sampah setiap tahunnya diangka Rp35 miliar.

Hal ini tak sebanding dengan subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani masalah persampahan.

Plt Kepala DLH Kota Makassar Ferdi Mochtar mengatakan subsidi setiap tahunnya untuk penanganan sampah mencapai Rp200 miliar.

Itu mencakup pengadaan hingga pemeliharaan infrastruktur sampah atau transportasi dan alat angkut sampah.

Anggaran Rp200 miliar itu juga sudah termasuk biaya untuk membayar insentif petugas sampah.

Karenanya, Pemkot [Makassar](#) akan melakukan penyesuaian terhadap retribusi sampah.

Sebab, nilai yang ada sekarang ini dianggap sudah tidak relevan.

"Sekarang kota sedang godok perwalinya. Sudah di bagian hukum, dan kita akan bahas teknis bersama tim ahli hukum Pemerintah [Makassar](#)," ucap [Ferdie Mochtar](#), Selasa (25/6/2024).

Kata Ferdi, penyesuaian ini harus dilaksanakan sebab merupakan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan pada 5 Januari lalu.

Rancangan peraturan wali kota tersebut kata Ferdi juga telah dipaparkan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Perwali ini kami sudah presentasikan di Kemendagri, karena ada keterkaitan dengan retribusi dan angka-angka, itu sudah kita diskusikan sampai di mana dapatkan turunan-turunan, mulai misalnya di tingkat rumah tangga miskin, menengah ke atas yang masing-masing berbeda tarif," paparnya.

Ferdi mencontohkan, retribusi sampah untuk keluarga miskin nilainya Rp25 ribu.

Hal tersebut disesuaikan dengan tarif listriknya, kalau misalnya Rp 900 watt ke bawah, nilainya Rp25 ribu per bulan.

Berdasarkan perwali yang berlaku sebelumnya, tagihan sampah untuk keluarga miskin Rp16 ribu per bulan.

"Jadi ada kenaikan kurang lebih sekitar Rp9.000, tapi kita tetap melihat perkembangan ditingkat masyarakat, makanya nanti ada perbaikan-perbaikan, tentunya kita akan rapatkan dan diskusikan kembali," ulasnya.

"Tapi kita juga melihat seberapa besar kontribusi pelayanan kita terhadap penanganan persampahan yang selama ini banyak di subsidi oleh pemerintah," sambungnya.

Terpisah, Wali Kota [Makassar](#) [Danny Pomanto](#) menyampaikan akan melakukan efisiensi terhadap seluruh armada sampah.

Danny merencanakan pembelian armada sampah listrik menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2024.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Danny berharap dengan menggunakan armada listrik, tidak ada lagi kebocoran anggaran operasional, khususnya dalam pembelian bahan bakar minyak.

Sehingga tidak ada lagi alasan tidak mengoperasikan armada karena tidak ada BBM.

Selain itu, untuk menghindari kebocoran iuran atau retribusi sampah, pembayarannya akan menggunakan aplikasi Pakinta’.

“Jadi tidak adami lagi yang bisa disalahgunakan. Langsung dibayar pakai Qris menggunakan

Sumber Berita:

1. <https://makassar.tribunnews.com/2024/07/07/polemik-retribusi-sampah-bonto-duri-ketua-rt-minta-persetujuan-warga-usai-diperiksa-inspektorat>
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/06/25/siap-siap-iuran-sampah-di-makassar-bakal-naik-warga-miskin-rp25-ribu-per-bulan>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.